

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Landasan hukum yang menjamin Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dirumuskan dalam UUD 1945 Pasal 27. Segala warga negara sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28C ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia. Pasal 28 I ayat (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Landasan hukum lain yang memastikan terciptanya Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) adalah UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan, dan Instruksi Presiden No 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional.

Pentingnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) diakui sebagai persoalan penting oleh Indonesia dan tercermin pada dokumen-dokumen Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978, 1993, 1988,1993 dan 1999. GBHN dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 1999-2004 menyebutkan secara khusus kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan khusus pembangunan dan GBHN menambahkan pentingnya perbaikan status perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Selanjutnya Strategi Pengarusutamaan Gender digarisbawahi sebagai strategi pembangunan nasional dan menjadi strategi lintas sektoral pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan

(SNPK) jangka panjang yang didalamnya terdapat Rencana Aksi 2005-2009.

Secara global sudah ada Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang di Indonesia sudah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984. CEDAW sebagai suatu komitmen global seharusnya menjadi payung dalam pembentukan perundang-undangan di semua negara yang menandatangani dan meratifikasinya. Di dalam CEDAW (UU 7/1984) jelas dinyatakan apa saja yang harus dilakukan oleh negara dalam meniadakan diskriminasi terhadap perempuan.

Tonggak lain dalam upaya meniadakan diskriminasi terhadap perempuan adalah kesepakatan Beijing yang dikenal dengan *Beijing Platform For Action* (BPFA). Ada dua belas wilayah kritis yang harus mendapat perhatian negara jika ingin menghapus diskriminasi terhadap perempuan menegakkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).

Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara maupun daerah sampai kini diukur salah satu diantaranya berdasarkan indikator pembangunan manusianya dengan populernya *Human Development Index (HDI)* dan *Gender Development Index (GDI)*.

Berdasarkan laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005 - 2012 yang dikeluarkan oleh BPS kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diketahui bahwa IPM Sulawesi Selatan sebesar 72,14 dan IPM Kabupaten Pangkep sebesar 69,89 yang berada di peringkat 22 di Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk IDG, Kabupaten Pangkep berada di peringkat 7 dengan angka IDG 58,93.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa hasil pembangunan sumberdaya manusia yang dilaksanakan selama ini masih terdapat kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki, baik dalam mendapatkan akses terhadap sumberdaya pembangunan, kesempatan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengambilan

keputusan, kontrol pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya pembangunan maupun penikmatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Kenyataan itu menunjukkan bahwa hasil pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini masih terdapat **kesenjangan relasi antara perempuan dan laki-laki (tepatnya kesenjangan gender)**, baik dalam akses terhadap sumberdaya pembangunan, kesempatan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pengambilan keputusan, kontrol pengawasan terhadap pemanfaatan sumberdaya pembangunan maupun dalam penikmatan hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, lingkungan, sosial budaya dan politik, dan pengambil keputusan, perlindungan anak dan berbagai aspek lainnya. Dalam bidang pendidikan, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan formal masih lebih banyak diberikan kepada laki-laki dibanding perempuan.

Penyusunan profil Gender merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam memberikan gambaran tentang kondisi gender di suatu wilayah Kabupaten/ Kota. Adanya nilai-nilai budaya patriarki di masyarakat yang masih kuat, telah menjadi sikap dan perilaku dalam kehidupan. Selain itu adanya pemahaman yang sempit dari penjabaran makna nilai dalam agama, serta nilai –nilai budaya lainnya yang cenderung bias gender. Akibatnya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam tradisi lisan seperti norma atau etika yang berlaku, mempertajam kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses, berpartisipasi, mengontrol dan mendapatkan manfaat dari sumberdaya. Profil Kabupaten Pangkep akan sangat berguna dalam merencanakan berbagai kebijakan pembangunan. Meskipun diketahui bahwa data Statistik yang ada telah menunjukkan beberapa data gender atau data terpilah, namun masih sangat terbatas pada data tertentu saja.

Buku Profil Gender akan memuat informasi tentang kondisi laki-laki dan perempuan yang berada disemua lembaga baik lembaga pemerintah

maupun swasta yang memiliki peran dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang responsif gender.

1.1.1. Tujuan

- Tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin, berupa data jumlah dan kondisi laki-laki dan perempuan.
- Tersedianya informasi gender, yang dapat dijadikan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan program yang ada.
- Menjadi pendorong bagi lembaga pemerintah dalam hal penyusunan data yang lebih responsif gender, yaitu menyiapkan data-data yang dipilah antara laki-laki dan perempuan.

1.1.2. Output (Luaran)

- Informasi statistik gender pada aspek pendidikan, ekonomi, ketenaga kerjaan, kesehatan, publik dan lainnya.
- Buku profil Gender Kabupaten Pangkep Tahun 2013.

1.1.3. Outcome (Dampak)

Buku Profil Gender akan berdampak pada :

- Proses munculnya kesadaran bagi semua pihak khususnya bagi penyusun kebijakan dalam merencanakan kegiatan dengan memperhatikan aspek kebutuhan laki-laki dan perempuan
- Program akan lebih efektif baik dari aspek waktu dan biaya
- Capaian tujuan lebih tajam dan berkesinambungan.

BAB II METODOLOGI

2.1. Lokasi Penyusunan Profil

Buku Profil gender akan mengambil data di Kabupaten Pangkajene Kepulauan Propinsi Sulawesi Selatan yang merupakan salah satu dari 24 Kabupaten di Sulawesi Selatan.

2.2. Teknik Pengumpulan Data

Buku Profil Gender disusun dengan mengakumulasi data-data gender yang berasal dari lembaga pemerintah baik dari departemen maupun non departemen, dinas maupun lembaga yang memiliki data terkait dengan analisis gender. Adapun bentuk data yang diakses adalah data sekunder, dan juga data primer yang diperoleh melalui wawancara untuk memperjelas informasi yang dianggap perlu. Selain itu dilaksanakan juga Sosialisasi rencana penyusunan Profil Gender yang dilanjutkan dengan Seminar Hasil (draft) rencana penyusunan Profil Gender yang mengundang semua instansi. Pada seminar hasil ini akan diperoleh masukan dari perbaikan data yang akan dibukukan.

2.3. Sumber Data

Sumber data pada Buku Profil Gender Kabupaten Kepulauan Pangkep terdiri dari :

- Data primer adalah data yang diperoleh dari berbagai kunjungan ke instansi/ dinas serta, berupa informasi lisan atau tertulis.
- Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari BPS dan berbagai laporan yang memiliki informasi gender di Kabupaten Pangkep.

2.4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya disusun berdasarkan kebutuhan dalam penyusunan Buku Profil Gender. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif yang mengacu pada analisis gender dengan lebih menonjolkan aspek komposisi data terpilah laki-laki dan perempuan.

2.5. Beberapa Pengertian Dasar

Untuk lebih memahami tujuan penyusunan Profil Statistik dan Indikator Gender, maka ada beberapa pengertian dasar yang perlu diketahui yaitu :

- **Feminin** adalah ciri, karakteristik, sikap dan perilaku dominan yang dimiliki kaum perempuan.
- **Maskulin** adalah ciri, karakteristik, sikap dan perilaku dominan yang dimiliki kaum laki-laki.
- **Patriarki** adalah sistem yang menganut garis laki-laki (ayah) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- **Matriarki** adalah sistem yang menganut garis perempuan (ibu) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.
- **Sex** adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian reproduksi.
- **Gender** adalah pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.
- **Bias Gender** adalah suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan.
- **Stereotipe** adalah citra buku yang melekat pada peran, fungsi, dan tanggung jawab yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

- **Relasi Gender** adalah menyangkut hubungan laki-laki dan perempuan dalam kerjasama saling mendukung atau saling bersaing satu sama lain.
- **Analisis Gender** adalah proses menganalisis data informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhi.
- **Kesetaraan dan Keadilan Gender** adalah suatu kondisi yang adil (*equity*) dan setara (*equality*) dalam hubungan kerjasama laki-laki dan perempuan.
- **Pengarusutamaan Gender** (*Gender Mainstreaming*) adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pementauan dan evaluasi.
- **Peran Domestik** adalah peran budaya yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
- **Peran Produktif** adalah peran budaya yang berkaitan dengan kegiatan menghasilkan produksi atau uang.
- **Peran Publik** adalah peran yang terkait dengan masalah sosial budaya dan kegiatan agama pada masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1. Letak dan Geografis

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan wilayah kepulauan yang secara geografis terletak antara 110° BT dan 4° 40' Lintang Selatan sampai 8°LS. Kabupaten Pangkep terletak di pantai Barat Sulawesi Selatan dengan batas-batas wilayah seperti berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Maros
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Luas Wilayah Kabupaten Pangkep 1.112,29 Km² terdiri dari 13 Kecamatan, 103 desa/kelurahan defenitif yang terdiri dari 38 Kelurahan dan 65 Desa. Dari desa tersebut terdapat 76 lingkungan, 164 dusun, 437 rukun warga dan 1285 rukun tetangga. Kabupaten Pangkep berjarak 51 Km dari Kota Makassar ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan. Secara Topografi Pangkep berada di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan yang terdiri dari dataran rendah dan pegunungan. Dataran rendah seluas 73.721 ha dan pegunungan yang berada pada ketinggian 100 - 1000 meter diatas permukaan laut. Pada bagian Timur merupakan batu cadas dan sebagian batubara dan juga ditemukan kandungan batu marmer.

3.2. Gambaran Pemerintahan Pangkep

Kabupaten Pangkep memiliki luas wilayah 111.210 Km² yang menyebar di 13 Kecamatan. Kecamatan yang terluas adalah adalah Balocci, Liukang Tangaya dan Tondong Tallasa. Pangkajene merupakan ibu Kota Kabupaten yang luas wilayahnya dapat dilihat pada tabel 1. Luasnya suatu wilayah dan ketersediaan SDA akan berpengaruh pada aktivitas masyarakat karena akan menjadi wilayah yang diminati untuk

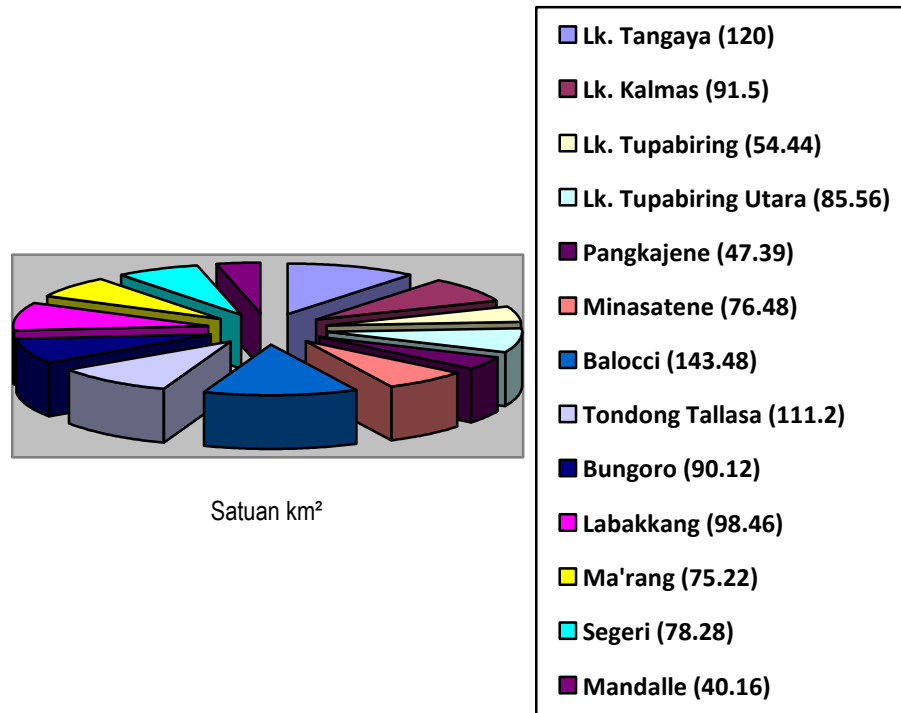
kegiatan ekonomi. Karena itu luas wilayah sangat potensi dalam mempercepat perkembangan. Bila luas wilayah didukung oleh keragaman sumberdaya alam (hayati), seperti pertanian, peternakan dan perikanan serta pertambangan, maka proses pembangunan akan menyentuh relasi gender. Kehidupan sosial dan ekonomi sangat tergantung pada tingkat partisipasi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan

Tabel 1. Luas area dan persentase luas menurut kecamatan di Kabupaten Pangkep tahun 2013

No	Kecamatan (1)	Uraian	
		Luas Area (km ²) (2)	Luas Area (%) (3)
1	Liukang Tangaya	120	10,79
2	Liukang Kalmas	91.5	8.23
3	Liukang Tupabiring	54.44	4.89
4	Liukang Tupabiring Utara	85.56	7.69
5	Pangkajene	47.39	4.26
6	Minasa Tene	76.48	6.88
7	Balocci	143.48	12.90
8	Tondong Tallasa	111.2	10.00
9	Bungoro	90.12	8.10
10	Labbakkang	98.46	8.85
11	Ma'rang	75.22	6.76
12	Segeri	78.28	7.04
13	Mandalle	40.16	3.61
	Jumlah	1112.29	100

Sumber : BPS Kabupaten Pangkep dalam angka Tahun 2013

Pada diagram 1 ditunjukkan luas wilayah berdasarkan kecamatan sebagai berikut :



Pada gambar nampak bahwa wilayah terluas adalah Balocci 143.48 km², Liukang Tangaya 120 km², dan Tondong Tallasa 111.2 km². Kabupaten Pangkep memiliki ciri khas sebagai Kabupaten kepulauan dengan 117 Pulau, yang berpenghuni hanya 80 Pulau. Sumberdaya hayati laut dan keanekaragaman biota lautnya, khususnya terumbu karang menyebabkan Kabupaten Pangkep ditunjuk sebagai lokasi proyek COREMAP II di Sulawesi Selatan. Selain Kabupaten Selayar yang dikenal dengan wilayah Takaboneratenya.

Di Pangkep Pulau Kapoposang memiliki terumbu karang yang indah dan saat ini termasuk sebagai wilayah konservasi laut dan beberapa pulau lainnya yang menjadi fokus kegiatan COREMAP II.

3.3. Sosial Budaya

Kabupaten Pangkep dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak potensi sumber daya bidang Perikanan, Pertanian dan Pertambangan. Hal inilah yang mendorong pesatnya perkembangan aktivitas masyarakat baik dari aspek sosial budaya dan ekonomi. Masuknya Proyek COREMAP II bertujuan menjaga, merehabilitasi terumbu karang yang saat ini mengalami banyak kerusakan karena perilaku masyarakat nelayan yang menggunakan bom atau bus (sianida) saat melaut.

Kabupaten Pangkep juga dikenal memiliki masyarakat yang terampil dalam membudidayakan udang, bahkan di era 80 – 90an Pangkep sebagai Kabupaten penyuplai Udang dan Bandeng di Sulawesi Selatan. Masyarakatnya dikenal sejahtera yang ditandai dengan setiap tahunnya jumlah masyarakat yang mendaftar untuk menunaikan ibadah haji meningkat.

Hasil produksi Pangkep selain dikenal sebagai penghasil udang dan Bandeng, juga memiliki hasil pertanian yang beragam mulai dari tanaman musiman maupun tahunan.

Aktivitas pertambangan juga terus berkembang, mulai dari industri kimia, batubara dan marmer. Produksinya selain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri juga di ekspor ke berbagai Propinsi dan Negara tetangga. Karena itu di kabupaten Pangkep ditemukan industri kecil, menengah dan industri besar. Salah satu produk yang cukup dikenal adalah Semen Tonasa yang sudah terkenal bukan hanya di Indonesia tetapi juga di Asia.

Dari aspek Agama, Masyarakat Kabupaten Pangkep mayoritas Islam dengan komposisi mencapai 95%. Selebihnya agama Kristen Protestan, Katolik dan Budha. Pada tabel berikut ditunjukkan komposisi penduduk berdasarkan agama sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah komposisi penduduk berdasarkan agama di Kabupaten Pangkep tahun 2013

Kecamatan	Agama				
	Islam	Kristen Katolik	Kristen	Hindu	Budha
Liukang Tangaya	18.900	-	-	-	-
Liukang Kalmas	13.357	-	12	3	-
Liukang Tupabiring	18.289	-	2	-	-
Liukang Tupabiring Utara	13.692	-	-	-	-
Pangkajene	41.152	52	108	38	-
Minasa Tene	32.406	2	83	3	-
Balocci	15.550	354	35	-	-
Tondong Tallasa	10.224	-	-	-	-
Bungoro	40.441	-	11	6	-
Labbakkang	49.861	49	60	-	-
Ma'rang	34.558	29	103	-	-
Segeri	20.335	2	40	-	-
Mandalle	15.439	43	-	-	-
Jumlah	324.204	531	454	50	-
Presentase	99,68	0,16	0,14	0,02	-

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2013

BAB IV DEMOGRAFI

Pembangunan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduknya, karena penduduk merupakan aset yang sangat penting bagi suatu daerah. Jumlah penduduk menjadi ukuran dalam menilai perkembangan pembangunan. Namun disisi lain penduduk dapat pula menjadi beban bagi daerah. Oleh karena itu jumlah penduduk perlu diarahkan dan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan serta kebutuhan pembangunan agar dapat memberikan manfaat maksimal.

Dalam dinamika pembangunan diberbagai bidang baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, peran dan fungsi penduduk sangat strategis oleh karenanya pembangunan bidang kependudukan selalu mendapat tempat utama. Hal ini disebabkan oleh akhir dari setiap tujuan pembangunan adalah meningkatkan mutu penduduk secara utuh dan menyeluruh yang biasanya diawali dengan perbaikan kualitas sumberdaya manusia (SDM). Pada bab ini akan dipaparkan kondisi demografis di Kabupaten Pangkep dari beberapa aspek yang dapat menunjukkan kondisi perkembangan laki-laki perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

3.1 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data BPS Kabupaten Pangkep Tahun 2013. jumlah penduduk secara keseluruhan 325.239 jiwa yang terdiri atas 157.006 orang laki-laki dan 168.233 orang perempuan. Jumlah penduduk tersebut menunjukkan bahwa proporsi penduduk laki-laki lebih kecil dari perempuan yaitu 48,27%, sedangkan penduduk perempuan 51,73%.

Pada Tabel 3 menunjukkan Kecamatan Labbakkang merupakan kecamatan dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terbesar, yaitu 49.970 jiwa, kemudian Kecamatan Pangkajene 41.350 dan Kecamatan Bungoro sebesar 40.458 jiwa. Adapun Kecamatan yang

jumlah penduduk yang paling sedikit adalah kecamatan Tondong Tallasa hanya sebesar 10.224 jiwa. Lebih jelasnya ditampilkan tabel 3 berikut :

Tabel 3. Jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin di kabupaten Pangkep, tahun 2013

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Liukang Tangaya	9.181	9.719	18.900	94
2	Liukang Kalmas	6.468	6.904	13.372	94
3	Liukang Tupabiring	8.816	9.475	18.291	93
4	Liukang Tupabiring Utara	6.684	7.008	13.692	95
5	Pangkajene	19.888	21.462	41.350	93
6	Minasa Tene	15.645	16.849	32.494	93
7	Balocci	7.887	8.052	15.939	98
8	Tondong Tallasa	4.928	5.296	10.224	93
9	Bungoro	19.953	20.505	40.458	97
10	Labbakkang	23.605	26.365	49.970	90
11	Ma'rang	16.728	17.962	34.690	93
12	Segeri	9.682	10.695	20.377	90
13	Mandalle	7.541	7.941	15.482	90
Jumlah		157.006	168.233	325.239	93
Persentase		48.27	51.73	100	

Sumber : BPS Kabupaten Pangkep dalam angka Tahun 2013

Pada Tabel 3 menunjukkan dari 13 Kecamatan terdapat 325.239 penduduk persentase jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan tidak terlalu berbeda yaitu 157.006 jiwa atau 48.27 % laki-laki dan perempuan 168.233 jiwa atau 51.73 %. Kecamatan Labbakkang merupakan kecamatan dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki dan

perempuan terbesar, yaitu 49.970 jiwa, kemudian kecamatan Pangkajene 41.350 dan Kecamatan Bungoro sebesar 40.458 jiwa. Adapun Kecamatan yang jumlah penduduk yang paling sedikit adalah kecamatan Tondong Tallasa hanya sebesar 10.224 jiwa. Lebih jelasnya dilihat pada diagram 3 berikut :

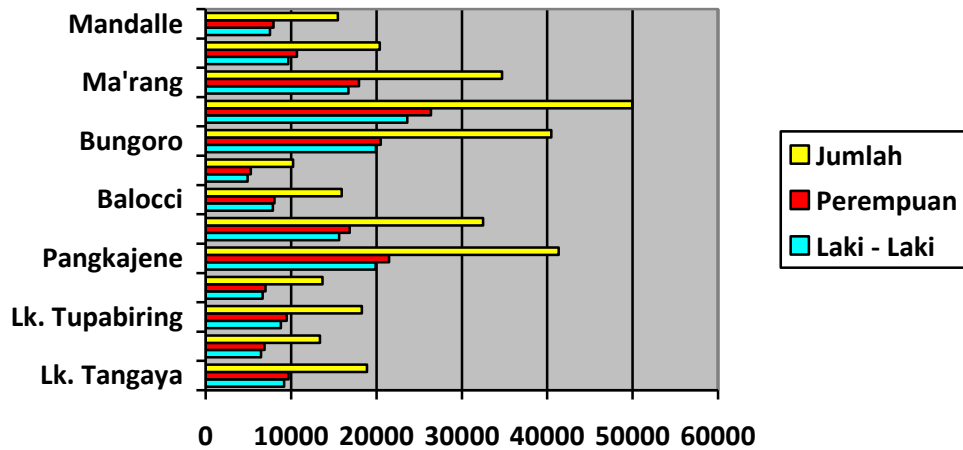


Diagram 2
 Persentase penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Pangkep tahun 2013

3.2 Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa penduduk adalah aset pembangunan, dengan demikian komposisi umur akan menunjukkan besarnya jumlah penduduk yang produktif. Komposisi umur penduduk biasanya dinyatakan dalam kelompok umur produktif dan tidak produktif. Umur produktif dikaitkan dengan aktivitas dalam bekerja. Sehingga penduduk yang dinyatakan berusia produktif apabila memasuki masa usia kerja. Untuk di Kabupaten Pangkep usia produktif disesuaikan dengan standar nasional yaitu wajib belajar 15 tahun. Penduduk Kabupaten Pangkep berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel 4 berikut :

Tabel 4. Jumlah penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin di Kabupaten Pangkep Tahun 2013

Kelompok Umur (Thn)	Jumlah Penduduk		Total	Sex ratio
	Laki-laki	Perempuan		
0-4	16.564	15.326	34.313	108
5-9	14.476	21.012	29.987	68
10-14	19.751	17.479	40.915	113
15-19	12.859	14.653	26.637	88
20-24	13.926	11.877	28.848	117
25-29	14.711	14.821	30.474	99
30-34	12.984	13.139	26.897	99
35-39	11.163	12.113	23.124	92
40-44	9.860	9.959	20.425	99
45-49	8.777	11.776	18.181	74
50-54	7.678	6.292	15.905	122
55-59	4.365	6.006	9.042	72
60-64	3.140	5.114	6.505	61
65+	6.752	8.666	13.986	77
Jumlah	157.006	168.233	325.239	93
Persentase	48.27	51.73	100	

Sumber : BPS Kabupaten Pangkep dalam angka Tahun 2013

Dari Tabel 4 nampak bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pangkep berdasarkan kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan sebagian besar berada pada kelompok umur dewasa / produktif yaitu 206,038 Jiwa atau 63,35% (kisaran 15 – 64 tahun). Selanjutnya terdapat kelompok umur lanjut (65 tahun keatas) sebesar 4,30%. Dengan demikian dapat dikatakan

komposisi penduduk Kabupaten Pangkep sangat mendukung proses percepatan pembangunan.

Data terpilah dari komposisi umur penduduk berdasarkan Gender sangat membantu pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan program yang responsif gender. Karena dengan data terpilah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan umur akan memudahkan mencapai tujuan. Seperti upaya peningkatan peran perempuan disuatu wilayah. Akan lebih jelas disusun dengan mengacu pada data jumlah dan komposisi umur terbesar. Selain itu program dapat direncanakan sesuai kebutuhan perempuan dengan kondisi karakteristik umur tersebut. Data komposisi penduduk yang dipilah berdasarkan kelompok umur dan gender akan bermanfaat untuk diprediksi seperti aspek kesejahteraan. Dengan banyaknya penduduk usia produktif. Semakin banyak Penduduk usia produktif maka dinamika pembangunan daerah semakin besar. Hal ini terkait dengan aktivitas masyarakat yang terdorong karena meningkatnya berbagai kegiatan masyarakat.

Penduduk usia non produktif yaitu usia 65 tahun keatas terdapat 4,30%. Persentase ini menunjukkan cukup besar jumlah penduduk usia lanjut. yang menggambarkan umur harapan hidup penduduk di Kabupaten Pangkep . Dari data pembangunan manusia berbasis gender 2007 diketahui bahwa usia harapan hidup di Sulawesi Selatan untuk laki-laki 67,0 tahun serta perempuan 71,0 tahun , yang berarti usia harapan hidup kaum perempuan lebih besar dibandingkan dengan kaum laki-laki. Kondisi ini juga berlaku di hampir seluruh Kabupaten termasuk di Indonesia. Berdasarkan pengamatan dikatakan penjangnya usia harapan hidup perempuan kemungkinan ada kaitannya dengan aspek nilai-nilai budaya masyarakat atau nilai gender yang diaplikasikan pada pelaksanaan peran-peran Gender. Tuntutan pada jenis kelamun laki-laki untuk menjadi yang “kuat” , “mampu” dan “tidak emosional” menjadikan laki-laki menjalankan peran tersebut dengan tidak menunjukkan perasaan lemah. Akibatnya baik secara langsung atau tidak laki-laki

mengalami “tekanan” dalam menjalankan peran tersebut. Sebaliknya perempuan memiliki keleluasan untuk mengungkapkan emosionalnya seperti menangis dan mengkespresikan perasaanya, baik suka atau tidak suka. Dengan demikian diduga ungkapan perasaan ini mendukung perpanjangan umur perempuan. Namun penjelasan ini belum dapat dibuktikan, diperlukan suatu kajian khusus sebagai dasar yang kuat.

BAB V

PENDIDIKAN

Bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan Nasional karena melalui bidang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pendidikan juga akan mendorong terbentuknya karakter yang positif dalam diri seseorang dalam berkarya dan bermasyarakat. Pendidikan juga secara tidak langsung akan mempengaruhi relasi gender yang lebih harmonis. Rencana aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk dapat mendukung terciptanya sistem pendidikan yang membentuk rasa saling menghargai dan menghormati serta mendorong rasa kerja sama antara perempuan dan laki-laki serta menghapus budaya kekerasan melalui kebijakan demokratisasi di bidang pendidikan.

Berdasarkan Buku Statistik Gender di Beberapa Kabupaten diketahui bahwa kesepakatan DAKKAR yang mengarahkan pendidikan yang berkeadilan gender dengan program yang saat ini dikenal dengan istilah PUS (Pendidikan Untuk Semua). Telah menghasilkan kesepakatan DAKKAR yaitu komitmen bersama untuk adanya perubahan kearah perbaikan kualitas perempuan sekitar 50 % dalam hal keniraaksaraan. Penjelasan berkaitan dengan bidang pendidikan, akan menjelaskan kondisi sarana prasarana pendidikan serta mengenai jumlah sarana sekolah, jumlah penduduk yang buta huruf, tingkat partisipasi sekolah (TPS), dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Pada penjelasan berikut ditunjukkan sarana prasarana pendidikan di kabupaten Pangkep sebagai berikut :

4.1. Sarana dan Prasarana Sekolah

Pendidikan yang merata dan berkelanjutan memerlukan dukungan yang sangat besar dari semua kalangan baik dari pemerintah pusat terlebih lagi dari masyarakat, hal yang paling utama adalah tersedianya

fasilitas pendidikan berupa sarana dan prasarana sekolah. Pada tabel 5 ditunjukkan jumlah sarana sekolah sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah sarana sekolah menurut jenjang pendidikan di kabupaten Pangkep tahun 2013

Sekolah	Jumlah	Guru		Murid	
		L	P	L	P
Sekolah Negeri					
TK	75	1	295	1.530	1.606
SD	296	947	2.138	21.521	20.343
SLTP	73	549	864	6.763	7.095
SLTA	16	247	311	2.333	3.316
SMK	15	256	355	3.815	4.156
Swasta					
SD	9	28	66	605	579
SLTP	29	220	341	1.790	1.606
SLTA	22	188	240	951	1.105
SMK	15	256	355	3.815	4.156
Jumlah	550	2.692	4.965	43.123	43.962

Sumber : BPS Kabupaten Pangkep dalam angka Tahun 2013

Pada Tabel 5 nampak jumlah sarana terbesar pada pendidikan sekolah dasar (SD) yaitu 296 buah, kemudian TK sebesar 75 buah. Besarnya jumlah sarana pendidikan pada tingkat dasar / pemula ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas anak di Kabupaten Pangkep. Karena diketahui bahwa untuk meningkatkan kualitas jumlah penduduk salah satu indikatornya adalah meningkatkan lama pendidikan anak. Berdasarkan temuan diketahui bahwa tumbuh kembang kemampuan IQ seorang anak dimulai pada tahap usia dini (sampai 5 tahun) kemudian

tahap usia sampai 9 tahun. Selebihnya peningkatan IQ hanya sekitar 20% lagi. Dengan demikian ketersediaan pendidikan pada usia TK dan SD sederajat sangatlah menunjang upaya peningkatan kualitas penduduk di kabupaten Pangkep. Sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas. Suasana belajar mengajar akan terasa lebih hidup, dan minat mencari ilmu pengetahuan bagi murid-murid akan tinggi. Perkembangan IPTEK dalam bidang pendidikan sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan manusia-manusia yang bergelut didalamnya.

Pada Tabel nampak bahwa untuk sekolah TK hanya 1 guru laki-laki. Data ini merupakan gambaran yang paling nyata dari efek adanya peranan gender di masyarakat. Laki-laki dinilai tidak memiliki "sensifitas" dalam mendidik anak kecil (TK), karena asumsi yang mengurus anak adalah perempuan. Padahal secara biologis laki-laki dan perempuan memang berbeda, akan tetapi dalam pelaksanaan peran gender baik laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama. Kondisi ini juga tergambar dari akumulasi rata-rata Guru perempuan yaitu 61,09% dan laki-laki 38,91%. Besarnya perbedaan persentase gender pada guru juga adalah gambaran bahwa pada tingkat dasar perempuan dianggap lebih "cocok". Hal ini nampak dari angka jumlah guru perempuan (61,09%) jauh lebih besar dari guru laki-laki yang hanya (38,91%). Lebih jelasnya sarana sekolah menurut jenjang pendidikan dapat pada diagram 5 berikut :

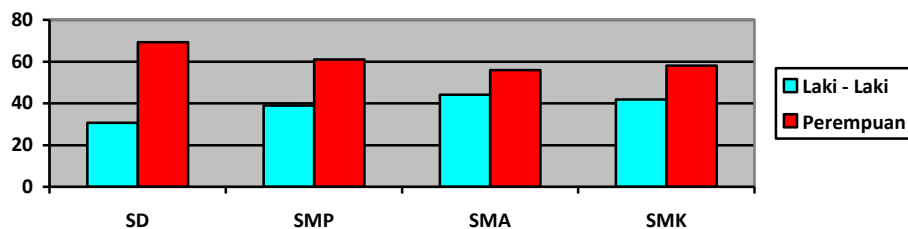


Diagram 3
Jumlah Guru Berdasarkan Tingkat sekolah dan jenis kelamin di Kabupaten Pangkep tahun 2013

4.2. Angka Buta Huruf

Pemerintah telah mengagendakan masalah penanganan buta huruf sebagai salah satu kebijakan yang penting. Hal ini disadari memiliki kaitan dengan peningkatan kualitas SDM sesuai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Usaha-usaha tersebut dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Angka Melek huruf menjadi data yang sangat diperlukan untuk kepentingan menilai kualitas manusia disuatu wilayah. Namun dalam kenyataannya sampai saat ini angka buta huruf khususnya Kabupaten Pangkep masih perlu mendapat perhatian. Pada Tabel 6 berikut disajikan data mengenai jumlah penduduk usia 10 Tahun keatas menurut Kemampuan membaca dan menulis di kabupaten Pangkep berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah perempuan yang tidak bisa membaca dan menulis sekitar 8.805 orang atau 62,85% dari total jumlah penduduk usia 10 tahun keatas yang tidak bisa baca tulis. Adapun laki-laki sebanyak 37,15%. Lebih jelasnya ditunjukkan pada Tabel 6 berikut :

Tabel 6. Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas menurut kemampuan Membaca dan menulis di Kabupaten Pangkep

Kemampuan membaca	Jenis kelamin				Jumlah	
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	LK+PR	%
Dapat membaca dan Menulis	101.523	33,26	189.725	62,15	291.248	95.41
Tidak Dapat	5.205	1,71	8.805	2,88	14.010	4.59
Jumlah	106.728	34,96	198.530	65,04	305.258	100,00

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Pangkep Tahun 2013

Pada Tabel nampak bahwa jumlah perempuan yang tidak bisa membaca dan menulis sebesar 2,88% lebih besar dari laki-laki yaitu 1,71%. Sebaliknya jumlah perempuan yang bisa baca tulis lebih dari laki-laki yaitu 62,15%.

Gambaran data gender ini bahwa baik laki-laki maupun perempuan perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan kemampuan baca tulisnya. Meskipun data yang ditampilkan tidak menjelaskan tentang kemampuan baca tulis ini apakah aksara Indonesia atau daerah. Mengingat masih banyak masyarakat di pedesaan yang tidak bisa baca tulis, tetapi mampu membaca tulisan bahasa daerah. Karena itu data ini perlu dielaborasi lebih jauh untuk mengetahui ketidak mampuan ini, termasuk menemukan penyebab adanya kesenjangan perbandingan tersebut. Pada diagram ditunjukkan kemampuan membaca / menulis berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

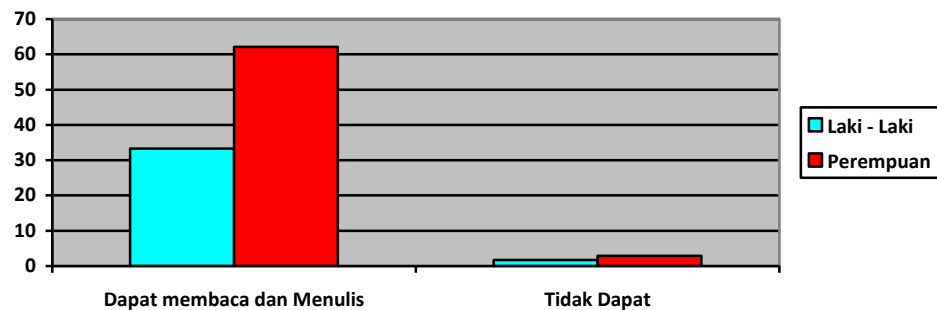


Diagram 4
Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas menurut kemampuan membaca/menulis dan jenis kelamin di kabupaten Pangkep

4.3. Tingkat Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah adalah gambaran perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah pada tingkat usia tertentu dengan jumlah seluruh anak pada tingkat umur tersebut. Tingkat partisipasi sekolah sangat terkait dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar serta keinginan masyarakat untuk aktif dalam sekolah. Data tentang tingkat partisipasi sekolah Kabupaten Pangkep tersaji pada tabel 7 berikut.

Tabel 7 Perserentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Pangkep Tahun 2013

Uraian	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi
Laki – Laki			
- 7 – 12	0	97.70	2.30
- 13 – 15	1.40	77.96	20.64
- 16 – 18	0	44.22	55.78
- 19 – 24	2.45	11.55	86.00
Perempuan			
- 7 – 12	0	97.69	2.31
- 13 – 15	0	89.78	19.22
- 16 – 18	1.59	56.00	42.41
- 19 – 24	0	17.79	82.21
Laki – Laki + Perempuan			
- 7 – 12	0	97.69	2.31
- 13 – 15	0.83	79.12	20.06
- 16 – 18	0.80	50.13	49.07
- 19 – 24	1.19	14.76	84.05

Sumber : BPS Kabupaten Pangkep dalam angka Tahun 2013

Berdasarkan tabel 7 yang bersumber dari BPS Kabupaten Pangkep Dalam Angka Tahun 2013 diketahui bahwa angka partisipasi sekolah (APS) laki-laki lebih rendah dari perempuan yaitu 57,85% dan 65,32%. Data ini menunjukkan bahwa cukup tinggi partisipasi gender pada pendidikan di kabupaten Pangkep .

4.4. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Besarnya angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai salah satu indikator ukuran keberhasilan pendidikan serta lamanya pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkatan pendidikan yang ditamatkan maka kualitas sumberdaya manusia secara umum akan semakin tinggi, ini akan berdampak pula pada segi ekonominya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka kondisi ekonomi masyarakat akan semakin baik. Untuk mengetahui tingkat pendidikan

tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Pangkep dapat dilihat pada tabel 8. Pada Tabel 8 nampak bahwa penduduk di Kabupaten Pangkep yang menamatkan pendidikan sampai jenjang S₁ sederajat terdiri dari perempuan 72,94% dan laki-laki 75,99%. Selanjutnya pada pendidikan dasar SD nampak perempuan jauh lebih banyak yaitu 35,30% dibanding laki-laki 32,62%. Data ini memberikan gambaran bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan laki-laki dan perempuan di kabupaten Pangkep masih banyak pada tingkat SD.

Tabel 8. Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Pangkep Tahun 2013

Tingkat Pendidikan Yang Ditamatkan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak Punya Ijazah SD	24.00	27.06	25.59
SD	32.62	35.30	34.01
SMP	16.68	14.67	15.64
SMA	20.98	15.99	18.39
Diploma I/II/III/Akademi/Universitas	5.71	6.98	6.37
Jumlah	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Pangkep dalam angka Tahun 2013

Secara umum data gender menunjukkan antara laki – laki dan perempuan di kabupaten Pangkep jumlah yang menamatkan pendidikannya mulai SD sampai sarjana berimbang, Lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut :

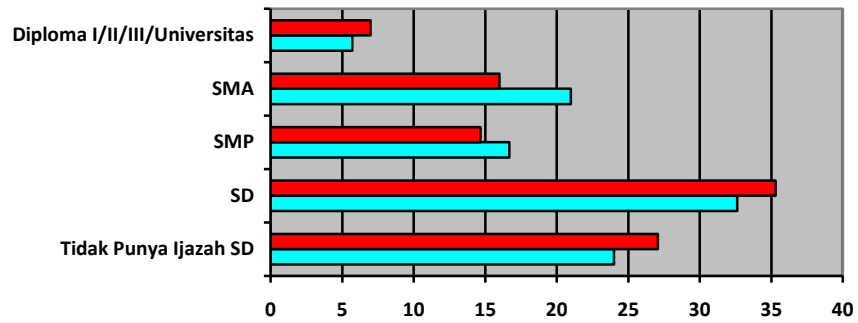


Diagram 5
 Persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin di Kabupaten Pangkep Tahun 2013

Pada diagram 5 memperjelas bahwa potensi perempuan menyelesaikan pendidikan lebih tinggi pada tingkat diploma dan Sarjana cukup besar mencapai 6.98% . Hal ini ada kaitannya dengan minat perempuan yang cukup besar menjadi guru dengan melanjutkan sekolah pada jenjang Diploma. Informasi gender yang dapat disimpulkan dari gambar 7 bahwa perempuan di kabupaten Pangkep telah memiliki kualitas yang cukup baik, terutama telah ada motivasi untuk melanjutkan pendidikan bukan hanya sampai SLTA.

BAB VI

KESEHATAN

Salah satu indikator menilai kesejahteraan suatu bangsa adalah derajat kesehatan masyarakatnya. Karena itu perhatian pemerintah terhadap kesehatan terus ditingkatkan terutama pada ibu hamil dan balita. Perhatian tersebut diwujudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya lain yang dilakukan adalah pengadaan dan memanfaatkan fasilitas kesehatan, penambahan dan peningkatan pemberian penyuluhan tentang pentingnya hidup sehat.

Pelayanan kesehatan diharapkan semakin baik dengan adanya fasilitas kesehatan yang semakin dekat dengan masyarakat, sehingga dapat secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan terjadinya perubahan pola pikir tentang pola hidup sehat. Untuk itu, keberadaan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan adanya bidan di desa akan mempengaruhi masyarakat sekitar untuk hidup sehat. Selain itu, semua lapisan masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan yang relatif mudah, murah dan merata sehingga dapat menghasilkan derajat kesehatan yang lebih tinggi dan memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial maupun ekonomis.

Kesetaraan gender dalam bidang kesehatan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan dengan visi Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu diketahui ada tidaknya isu gender yang muncul di bidang ini yang akhirnya mengakibatkan kesetaraan gender.

Pada bahasan bab ini akan diungkapkan beberapa kondisi ibu, anak dan balita serta sarana penunjang kesehatan. Pada setiap bagian akan diperlihatkan data-data mengenai kondisi dan posisi penduduk baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai sumber yang akan mengungkapkan berbagai isu gender pada bidang kesehatan.

5.1 Sarana Prasarana

Sarana prasarana merupakan penunjang untuk tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat di kabupaten Pangkep. Pada tabel 9 diperlihatkan sarana prasarana yang tersedia.

Tabel 9 . Banyaknya fasilitas Kesehatan di Kabupaten Pangkep Tahun 2013

Fasilitas Kesehatan	Jumlah	Persentase
Rumah Sakit	2	0.36
Rumah Sakit Bersalin Swasta	1	0.18
Puskesmas	23	4.18
Puskesmas Pembantu	60	10.91
Puskesmas Keliling	15	2.73
Posyandu	379	68.91
Klinik Balai Kesehatan	0	0
Praktek dokter	38	6.91
Praktek Bidan	13	2.36
Apotik	19	3.45
Jumlah	550	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013

Pada tabel 9 nampak bahwa fasilitas kesehatan yang terbanyak adalah posyandu, dan Puskesmas Pembantu. Banyaknya fasilitas kesehatan ini mengingat luasnya wilayah Kabupaten Pangkep dan penduduk yang menyebar di 13 Kecamatan kota. Karena itu Puskesmas Pembantu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat bagi masyarakat. Fasilitas kesehatan hanya akan berfungsi optimal bila ditunjang oleh petugas kesehatan dan tenaga medis seperti yang ditampilkan pada tabel 10 berikut:

Tabel 10 . Banyaknya Tenaga Medis Kesehatan di Kabupaten Pangkep Tahun 2013

Tenaga Kesehatan Medis	Jumlah	Persentase
Dokter Umum	40	3.42
Dokter Gigi	30	2.56
Apoteker	14	1.20
Bidan	156	13.33
Perawat	304	25.98
Dukun	301	25.73
Lainnya	325	27.78
Jumlah	1.170	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013

Pada tabel 10 belum nampak data gender antara tenaga medis kesehatan laki-laki atau perempuan. Kecuali bidan dan dukun adalah perempuan. Namun secara umum menunjukkan telah tersedia tenaga medis yang cukup untuk membantu masyarakat yang membutuhkannya. Pada tabel Juga nampak masih banyaknya tenaga dukun yang berarti masih ada masyarakat yang menggunakan tenaga dukun untuk persalinan. Karena itu perlu adanya pelatihan bagi dukun untuk menjaga tidak terjadinya kematian pada ibu saat persalinan. Gambar berikut menunjukkan persentase tenaga medis di kabupaten Pangkep.

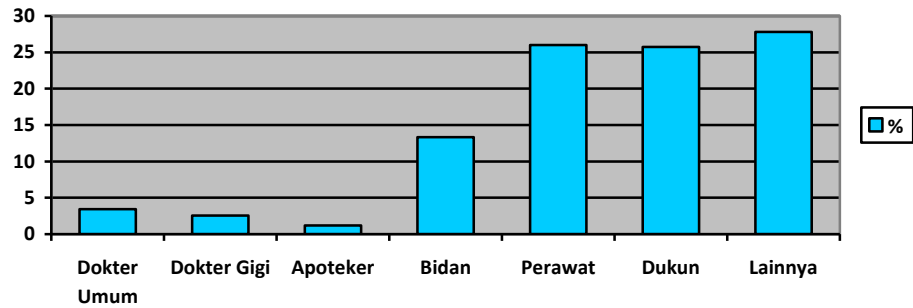


Diagram 6
Persentase jumlah tenaga medis di kabupaten Pangkep 2013

Pada tabel selanjutnya diperlihatkan komposisi dokter ahli berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 11. Banyaknya Dokter Ahli menurut jenis kelamin di Kabupaten Pangkep Tahun 2013

Spesialisasi	Laki-laki	Perempuan	Total
Penyakit dalam	0	1	1
Kebidanan	0	1	1
Anak	0	1	1
Bedah	1	0	1
Anastesi	1	0	1
Radiologi	0	1	1
Syaraf	0	1	1
THT	1	0	1
Kesehatan Jiwa	0	1	1
Kulit kelamin	0	1	1
Mata	0	1	1
Jumlah	3	8	11
Persentase	27,2	72,8	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013

5.2 Imunisasi

Imunisasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Imunisasi yang memberikan kekebalan/ daya tahan pada tubuh manusia. Sejak ditemukannya teknologi di bidang kesehatan yaitu imunisasi yang diberikan kepada bayi/balita untuk mencegah penyakit yang biasa menyerang anak, telah berdampak pada semakin menurunnya angka kematian bayi dan anak. Utamanya pada usia balita, diketahui bahwa anak usia balita sangat rentan terkena berbagai jenis penyakit yang mungkin dapat mengakibatkan kematian. Pemberian imunisasi umumnya dilakukan dalam rentang waktu 5 tahun pertama sebagai tindakan preventif terhadap masuknya berbagai jenis penyakit ke dalam tubuh. Dikenal berbagai jenis imunisasi untuk bayi dan balita, antara lain BCG, Campak, DPT dan Polio. Pada tabel 12 disajikan data mengenai cakupan imunisasi bayi di Kabupaten Pangkep tahun 2013.

Tabel 12. Jumlah Balita menurut pemberian imunisasi di kabupaten Pangkep tahun 2013

Kecamatan	BCG	Campak	DPT	Polio	Jumlah
Liukang Tangaya	367	347	362	367	1.443
Liukang Kalmas	294	377	291	308	1.270
Liukang Tupabbiring	331	343	346	352	1.372
Liukang Tupabbiring Utara	249	256	275	233	1.013
Pangkajene	914	792	839	840	3.385
Minasatene	692	716	731	720	2.895
Balocci	330	335	334	330	1.329
Tondong Tallasa	228	202	199	218	847
Bungoro	810	804	815	816	3.245
Labakkang	890	897	907	859	3.553
Ma'rang	723	694	718	690	2.825
Segeri	446	457	515	501	1.919
Mandalle	289	290	286	282	1.147
Jumlah	6.563	6.510	6.618	6.516	26.207

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013

Pada tabel nampak bahwa belum dibuat data terpilah dari balita yang diimunisasi. Pentingnya data gender balita adalah untuk mengetahui status dan kondisi balita laki-laki dan perempuan. Selanjutnya tentang status gizi balita menunjukkan dari 13 kecamatan terdapat 10 kasus gizi buruk yang terdapat di kecamatan Pangkajene, Labakkang, Balocci dan Kecamatan Liukang Tangaya. Gizi buruk yang dialami bayi dan balita ini juga ada kaitannya dengan asupan ibu saat hamil yang kemudian berdampak pada kesehatan bayinya.

5.3. Jumlah Kelahiran Dan Kematian Bayi

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Angka kematian bayi secara tidak langsung dapat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan gizi, terutama saat kehamilan dan melahirkan. Data mengenai jumlah kelahiran bayi dan kematian bayi menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 13 berikut.

Tabel 13. Angka kematian bayi di Kabupaten Pangkep Tahun 2013

No	Kecamatan	Hidup	Meninggal
1	Liukang Tangaya	374	4
2	Liukang Kalmas	296	-
3	Liukang Tupabiring	299	1
4	Liukang Tupabiring Utara	265	1
5	Pangkajene	853	5
6	Minasa Tene	611	5
7	Balocci	316	1
8	Tondong Tallasa	226	3
9	Bungoro	792	8
10	Labbakkang	966	1
11	Ma'rang	739	5
12	Segeri	433	5
13	Mandalle	243	1
Jumlah		6.413	40

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013

5.4. Partisipasi Ber KB

Tingkat kesadaran keluarga untuk berpartisipasi ber KB sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun masih diperlukan upaya-upaya untuk mengajak akseptor muda .

Pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya berdampak pada aspek sosial budaya. Ketidak seimbangan antara perekonomian dan pertumbuhan penduduk akan memperlambat proses pembangunan daerah. Karena itu program Keluarga Berencana (KB) terus diaktifkan. Pada tabel 14 menunjukkan alat KB yang paling banyak yang digunakan adalah suntik dan Pil masing-masing 50,59% dan 35,83%. Selebihnya adalah Implant ,kondom dan IUD. Kejelasan data ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 14. Jumlah penduduk wanita usia 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin menurut alat/cara KB yang sedang digunakan di Kabupaten Pangkep tahun 2009

Alat KB Yang Sedang Digunakan	Jumlah	Persentase
MOW/MOP	357	0.90
AKR/IUD/Spiral	349	0.88
Suntikan KB	20.157	50.59
Pil KB	14.276	35.83
Kondom	2.778	6.97
Implant	1.927	4.84
Jumlah	39.844	100

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2013

Berdasarkan pendekatan kebutuhan gender, maka partisipasi perempuan yang begitu besar dalam mendukung program pemerintah untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk masih bias gender. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi laki-laki dalam ber KB. Meskipun

diketahui jenis alat dan cara laki-laki hanya menggunakan kondom dan tubektomi yang kurang diminati laki-laki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram berikut :

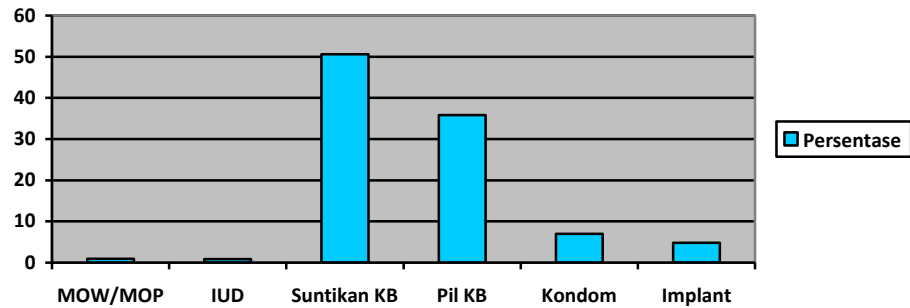


Diagram 7
Jumlah penduduk wanita usia 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin menurut alat/cara KB yang sedang digunakan Di Kabupaten Pangkep Tahun 2013

5.5. Lama Pemberian Asi

Salah satu tugas seorang ibu adalah memberikan bayinya ASI. Karena kesehatan sebagai modal penting dalam pembangunan SDM, utamanya generasi bangsa yaitu anak (bayi) yang tidak lepas dari proses tumbuh kembang anak. Salah satu indikator berlangsungnya pertumbuhan anak yang baik apabila pemberian asi eksklusif dilakukan sejak bayi. Karena berdasarkan penelitian diketahui pada air susu ibu terdapat zat pertumbuhan dan antibodi yang tak dapat dibuat oleh teknologi apapun. Oleh sebab itu upaya pemberian asi pada anak usia bayi untuk jangka waktu tertentu sangatlah penting. Pada tabel berikut ditunjukkan jumlah pemberian asi pada usia bayi sampai 1 tahun.

Tabel 15. Jumlah bayi yang diberikan ASI Eksklusif di Kabupaten Pangkep tahun 2013

No	Kecamatan	Pemberian ASI	
		Jumlah (jiwa)	ASI Eksklusif
1	Liukang Tangaya	365	0
2	Liukang Kalmas	268	149
3	Liukang Tupabiring	620	284
4	Pangkajene	781	413
5	Minasa Tene	649	253
6	Balocci	323	191
7	Tondong Tallasa	221	175
8	Bungoro	781	355
9	Labbakkang	886	391
10	Ma'rang	713	470
11	Segeri	425	199
12	Mandalle	285	259
Jumlah		6.317	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2013

BAB VII EKONOMI

Aktifitas ekonomi akan menggerakkan pembangunan daerah, karena itu kegiatan masyarakat yang dinilai dari jumlah penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin. Pada tabel 16 berikut :

6.1. Lapangan pekerjaan

Tabel 16. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Pangkep Tahun 2013

Lapangan usaha	Laki-laki	Perempuan	Total
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	26.686	5.004	31.690
Industri pengolahan	7.863	5.879	13.742
Perdagangan Besar, eceran, Rumah Makan, dan Hotel	12.082	15.138	27.220
Jasa Kemasyarakatan	11.201	11.473	22.674
Pertambangan, Penggalian; Listrik, Gas, dan Air; Bangunan; Angkutan Bangunan dan Komunikasi; Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	18.107	223	18.330
Jumlah	75.939	37.717	113.656
Persentase	66.81	33.19	100

Sumber : BPS Kabupaten Pangkep dalam angka Tahun 2013

6.2. Pencari kerja

Pada Tabel berikut ditunjukkan jumlah pencari kerja di kabupaten pangkep berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan

Tabel 17. Jumlah pencari kerja berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan di Kabupaten Pangkep tahun 2013

Pendidikan Pencari kerja	Laki-laki	Perempuan	Persentase
Tidak tamat SD	0	0	0
SD	319	7	2.19
SLTP	663	7	1.06
SLTA	3.777	191	5.06
Diploma I	0	0	0
Diploma II	507	17	3.38
Diploma III	491	38	7.74
Diploma IV, S1	1.171	17	1.45
S2	5	2	40
S3	0	0	0
Jumlah	6.929	279	4.03

Sumber : BPS Kabupaten Pangkep dalam angka Tahun 2013

BAB VIII PUBLIK

7.1. PNS

PNS merupakan abdi negara, yang bertugas melayani masyarakat. Pada tabel 18 ditunjukkan jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 18. Jumlah pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Pangkep berdasarkan jenis kelamin dan golongan tahun 2009

No.	Golongan	L	P	Total
1	Golongan I	82	23	105
2	Golongan II	871	1.076	1.947
3	Golongan III	1.362	1.815	3.177
4	Golongan IV	783	1.058	1.841
	Jumlah	3.098	3.972	7.070
	Persentase	44	56	100

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat daerah Kab. Pangkep, 2013

Pada tabel nampak sangat potensi PNS perempuan dimana pada Golongan III terdapat 57,12% perempuan dan Golongan IV 57,46%. Namun dalam posisi struktural tidak nampak perempuan pada pengambil keputusan .Pada Tabel berikut diperlihatkan komposisi gender pada jabatan sebagai berikut :

Tabel 19. Jumlah pegawai negeri sipil berdasarkan Jabatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pangkep tahun 2009

No.	Jabatan	L	P	Total
1	Pejabat Struktural	527	225	752
2	Pejabat Fungsional	1.791	3.069	4.860
3	Staf	780	678	1.458
	Jumlah	3.098	3.972	7.070
	Persentase	44	56	100

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat daerah Kab. Pangkep, 2013

Bila tabel 19 dibandingkan dengan tabel 18, nampak bahwa perempuan yang banyak di golongan IV tidak memiliki posisi strategis. Hal ini dapat dijadikan isu gender untuk menilai faktor penyebab rendahnya partisipasi perempuan pada kedudukan strategis. Lebih jelas komposisinya diperlihatkan pada diagram berikut :

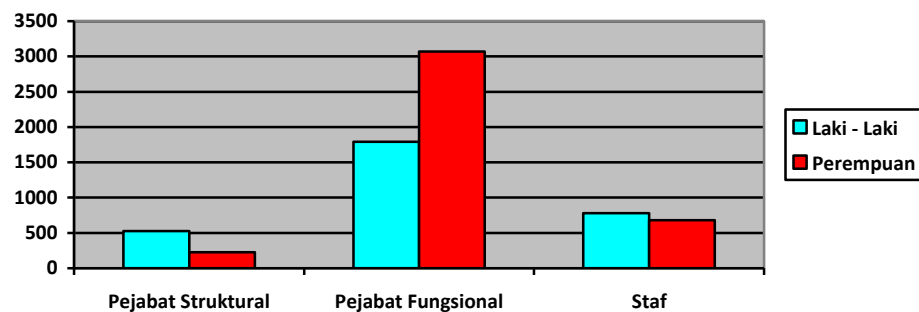


Diagram 8
Persentase jumlah PNS berdasarkan Jabatan di kabupaten Pangkep 2013

Tabel 20. Jumlah PNS berdasarkan jabatan Eselon se-Kabupaten Pangkep

No.	Kedudukan	L	%	P	%	Total
1	Fungsional Umum	780	-	678	-	1.458
2	Fungsional Tertentu	1.791		3.069		4.860
3	Staf Ahli	4		1		5
4	Eselon II	24		5		29
5	Eselon III	119		23		142
6	Eselon IV	384		197		581
	Jumlah	3.098		3.972		7.070

Sumber : Badan Kepegawaian dan Diklat daerah Kab. Pangkep, 2013

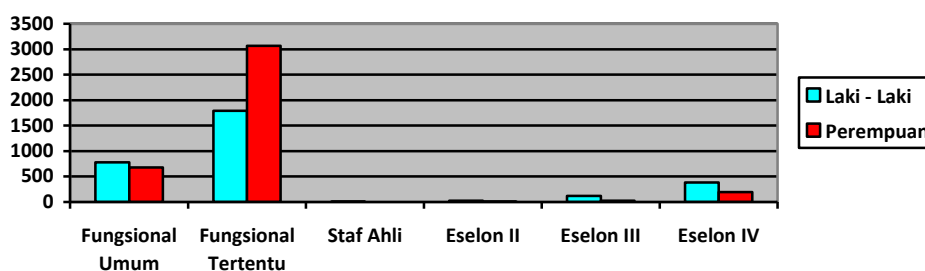


Diagram 9
Persentase jumlah PNS Eselon dan jenis kelamin
di kabupaten Pangkep 2013

7.2. Partisipasi perempuan pada bidang legislatif

Partisipasi perempuan di legislatif merupakan gambaran dari penilaian masyarakat terhadap peran perempuan dalam kedudukan strategis. Mengingat pemilihan anggota Dewan langsung dari masyarakat. Pada Tabel partisipasi perempuan di legislatif merupakan gambaran dari penilaian masyarakat terhadap peran perempuan dalam kedudukan strategis. Mengingat pemilihan anggota Dewan langsung dari masyarakat.

Pada Tabel berikut ditunjukkan jumlah komposisi gender di DPRD Pangkep Tahun 2009-2014

Tabel 21. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Pangkep periode 2004/2009 menurut fraksi dan jenis kelamin

No.	Fraksi	Jumlah Anggota				Total
		Lk	%	Pr	%	
1	Golkar	8	100	0	0	8
2	PPP	10	100	0	0	10
3	PKS	3	100	0	0	3
4	PKB	4	100	0	0	4
5	PBR	3	75	1	25	4
6	Demokrat	4	66,6	2	25	6
	Jumlah	32	-	3	-	35
	Persentase	-	91,4	-	8,5	100

Sumber : Kantor DPRD Kab. Pangkep 2013

7.3. Partisipasi perempuan di yudikatif

Sebagaimana di legislatif, maka di bidang yudikatif juga akan dilihat komposisi gendernya. Pada tabel berikut ditunjukkan komposisi gender di TNI dan Polri yang menggambarkan dominasi laki - laki. Hal ini disebabkan oleh nilai-nilai budaya masyarakat yang menganggap bidang ini lebih cocok untuk laki-laki. Sehingga persentase perempuan sangat kurang.

Tabel 22. Jumlah personil TNI dan Polisi berdasarkan kepangkatan dan jenis kelamin di Kabupaten Pangkep tahun 2013

No.	Pangkat	L	P	Total
1	Perwira Tinggi	-	-	-
2	Perwira menengah	8	-	8
3	Perwira pertama	64	1	65
4	Bintara Tinggi	177	2	179
5	Bintara	485	6	491
6	Tantama	22	-	22
	Jumlah	756	9	765
	Persentase	98.82	1.18	100

Sumber : BPS Kabupaten Pangkep dalam angka Tahun 2013

Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu aspek Hukum yang saat ini mulai diketahui oleh masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan yang dapat terjadi bukan saja diluar rumah tetapi juga dalam rumah tangga. Sehingga saat ini telah ada UU KDRT yang melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan. Berdasarkan data BPS Tahun 2013 diketahui KDRT yang dilaporkan hanya 3 kasus, dengan penyebab utamanya adalah masalah ekonomi. Adapun dari aspek kriminal juga ditemukan pelaku perempuan, meskipun dominasi pada laki-laki. bentuk pidana mulai dari pembunuhan sampai pencurian atau penggelapan. Pada tabel 23 ditunjukkan Jumlah Narapidana dan Tahanan di Kabupaten Pangkep berdasarkan jenis kelamin. Terdapat 167 Laki-laki sebagai narapidana dan 4 perempuan. Yang menjadi tahanan dari Polisi, Jaksa dan Mahkamah Agung 437 laki-laki dan 12 Perempuan. Lebih jelasnya ditampilkan pada tabel berikut;

Tabel 23. Jumlah Narapidana dan Tahanan berdasarkan jenis kelamin di kabupaten Pangkep tahun 2013

No.	Uraian	L	P	Total
1	Narapidana	167	4	171
2	Tahanan	437	12	449
	Jumlah	604	16	620
	Persentase	97.42	2.58	100

Sumber : BPS Kabupaten Pangkep dalam angka Tahun 2013

Dari tabel nampak sangat kecil persentase perempuan yang terlibat pada tindak kriminal yaitu hanya 2,58%. Kasus tersebut umumnya adalah aspek pencurian karena masalah ekonomi.

Perempuan melaksanakan kejahatan biasanya terkait dengan masalah ekonomi seperti terlilit utang dalam kegiatan usaha. Oleh sebab itu meskipun persentasenya kecil perlu menjadi perhatian untuk memberikan perempuan keterampilan berwirausaha yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi keluarganya.

BAB IX

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

8.1. KESIMPULAN

- Data-data yang tersedia dari berbagai sumber belum banyak yang dipilah berdasarkan jenis kelamin.
- Potensi partisipasi perempuan diberbagai sektor baik sektor Pemerintah maupun publik menunjukkan masih ada beberapa bidang yang kurang responsif gender.
- Data kesehatan masih perlu dirinci berdasarkan jenis kelamin. Terutama yang terkait dengan indikator Human Development Index (HDI) atau IPM yang mempengaruhi rendahnya IPM Pangkep.
- Pada bidang legislatif perempuan belum mendapatkan porsi yang seimbang, serta kedudukannya dalam komisi bukan pada posisi strategis atau sebagai pengambil keputusan.

8.2. REKOMENDASI

- Perlu sosialisasi tentang pentingnya data terpilah berdasarkan gender (jenis kelamin) kesemua instansi, agar menjadi database dalam penyusunan kebijakan program Kabupaten Pangkep.
- Perlu Pelatihan Penyusunan Program berbasis gender pada semua instansi (SKPD), pada pengambil keputusan di Kabupaten Pangkep termasuk anggota DPRD. Agar ada kesamaan pandang terhadap pembangunan yang responsif gender.
- Penyusunan Statistik Kabupaten Pangkep, juga diikuti dengan penyusunan Profil Gender yang dianggarkan, minimal setiap 2 tahun sekali.